

**PIDATO PENGANTAR TIM PROMOTOR
PADA UPACARA PENGANUGERAHAN DOKTOR HC
HENDARMAN SUPANDJI**

Bismillahirrahmanirrahim;

Assalamu'alaikum wr. Wb.; Salam sejahtera bagi kita semua; Om Svastyastu;

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah swt, saya dengan senang hati menerima tugas sebagai Tim Promotor bersama Prof. Dr. Nyoman Serikat Putrajaya, SH dan memberikan "orasi pengantar" dalam upacara penganugerahan doktor HC hari ini kepada Hendarman Supandji, SH, alumni FH Undip.

Dalam orasi pengantar ini, perkenankan saya pertamanya menyampaikan perasaan kegembiraan dan kebanggaan saya kepada "Dimas" Hendarman (perkenankan saya menyapa dengan kata "dimas" karena hanya selisih 4 tahun). Tidak hanya selaku pribadi dan atas nama rekan sejawat sesama alumni, namun juga a/n almarhum guru kita Prof. Sudarto. Saya yakin, beliau akan sangat bangga dan terharu melihat prestasi Dimas hari ini. Bukan hanya karena karier Dimas di bidang tugas (selaku Jaksa) sudah mencapai puncak tertinggi (sebagai JAGUNG), melampaui karier beliau di Kejaksaan, tetapi karena Dimas telah benar-benar menjadi "MURID

TELADAN” yang dapat mewujudkan ”ajaran/pesan moral dan perilaku mulia” yang beliau tanamkan dan teladankan kepada murid-muridnya. Khususnya sifat kasih sayang dan mengutamakan nilai-nilai kebenaran dan kejujuran.

Keanggunan dan kebegawanan seorang ilmuwan ditandai oleh gagasan/ide dasar pemikiran dan nilai-nilai kejiwaan/filsafati yang dihayati dan diimplementasikannya secara konsisten. Ide dasar, pokok pemikiran dan nilai-nilai kejiwaan/filsafati para begawan hukum itu ada yang bertolak dari nilai keadilan dan hati nurani, nilai kemanusiaan dan kasih sayang, nilai-nilai religius dan kebenaran ilahiah, nilai kepercayaan antar sesama, nilai harmoni/keseimbangan nilai dsb. Nilai-nilai dasar (*basic values*) itulah yang terlihat dalam pemikiran para begawan hukum, sehingga mereka dikenal dan dikenang sepanjang masa (seperti Prof. Paul Scholten, Prof. Pompe, Prof. Van Hamel, Prof. Moeljatno, Prof. Sudarto, Prof. Mr. Roeslan Saleh, Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, Prof. Dr. O. Notohamidjojo, Prof. Bismar Siregar dsb).

Bertolak dari nilai dasar (*basic values*) itulah, muncul berbagai pernyataan para begawan yang mengandung butiran-butiran mutiara di dalamnya, antara lain :

- ilmu hukum adalah ilmu tentang keadilan;
- setiap putusan hukum seorang jurist adalah putusan hati nurani;
- mengadili adalah pergulatan hati nurani;

- Berhukum itu tak hanya berbasis teks, tetapi juga akal sehat dan hati nurani;
- hukum adalah perwujudan dari nilai kepercayaan dan bertujuan untuk melindungi nilai kepercayaan;
- Hukum adalah kepercayaan. Penegak hukum adalah orang "yang sepatutnya diper-caya", dan "menegakkan wibawa hukum" berarti "menegakkan nilai kepercayaan" di dalam masyarakat.
- pembaharuan hukum pidana tidak boleh meninggalkan nilai-nilai kemanusiaan, ialah kasih sayang terhadap sesama;
- "tanggung jawab jurist ialah merohaniahkan hukum", dan "penilaian *scientia iuridis* harus mendalam dan mendasar pada *conscientia*" (nilai kebenaran, keadilan, ke-jujuran, kasih sayang antar sesama dsb).

Bertolak dari kriteria "*basic values*" itu, Tim Pengkaji dan Tim Promotor mempunyai kesan kuat, bahwa nilai dasar "kejujuran" menjadi inti pendirian Dimas Hendarman dalam menjalani kehidupan pada umumnya maupun dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum (telah berkarier sebagai Jaksa lebih dari 30 tahun). Mungkin dilatarbelakangi nilai kejujuran yang sangat mendalam inilah, dalam pemberitaan pers Dimas Hendarman dikatakan "menangis" sewaktu terjadi kasus suap 6 (enam) miliar yang menimpa anak buahnya. Ditulis dalam pemberitaan itu: "*Hendarman Supandji*

meneteskan air mata, suaranya pun bergetar. Inilah pertama kali dalam sejarah kejaksaan di negeri ini, jaksa agung kehilangan kontrol emosinya” (sbr. Internet). Semoga Dimas betul-betul menangis hati nuraninya, bukan seperti yang di”seloroh”kan orang ”menangisnya mungkin karena tidak ikut kebagian/kecipratan”.

Nilai dasar moral dan sikap jujur inilah yang kemudian diimplementasikannya dalam berbagai kebijakan ketika mendapat kepercayaan/amanat memegang tampuk pimpinan tertinggi di kejaksaan, antara lain :

- 1) Menyelenggarakan GALAKSI (Gerakan Aksi Langsung Anti Korupsi Sejak dini) dan bekerjasama dengan Karang Taruna Nasional membentuk Kantin Kejujuran (KK) di sekolah-sekolah tingkat SMP dan SMA seluruh Indonesia sejak tahun 2007; yang dilingkungan Kejagung sendiri baru diresmikan pada tgl. 2 Nopember 2008 dan diteruskan di lingkungan Kejaksaan seluruh Indonesia;
- 2) Dalam berbagai kesempatan meresmikan KK itu, Dimas Hendarman juga menyematkan Satya Lencana “Akutilla” (berarti “jujur/kejujuran”) kepada para pejabat/tokoh tertentu, sebagai “bahasa simbol” agar ybs menanamkan dan menyebarkan kejujuran di lingkungannya masing-masing.

- 3) Dalam menyambut “Hari Anti Korupsi Sedunia”, meresmikan Sekolah Anti Korupsi (SAK) Pangeran Diponegoro pada tgl. 4 Desember 2008 di SMUN 3 Setia Budi Jakarta; Pada waktu peresmian, terpampang tabir bertuliskan ”MENUJU MASA DEPAN BEBAS KORUPSI MELALUI SEKOLAH ANTI KORUPSI”; dan dalam sambutannya, Hendarman menjelaskan bahwa : **”Berdasarkan sejarah, Pangeran Diponegoro berjuang melawan Belanda karena Belanda itu mengambil harta kekayaan bangsa Indonesia”**. Oleh karena itu, SAK diberi nama SAK Pangeran Diponegoro.
- 4) Menempelkan pengumuman di tempat-tempat strategis di lingkungan Kejawung agar masyarakat tidak memberi uang/barang/janji kepada aparat kejaksaan;
- 5) Mengeluarkan ”perintah harian” pada Hari Bhakti Adyaksa (22 Juli) yang berbasis moral, antara lain :
 - ”HINDARI SEGALA BENTUK PERBUATAN TERCELA DAN JANGAN MENCEDERAI HATI RAKYAT” – perintah harian 2007; dan
 - ”TEGAKKAN HUKUM TANPA PANDANG BULU DENGAN MENGEDE-PANKAN MORAL YANG BAIK” - perintah harian 2008.
- 6) Di samping meneruskan kebijakan Jagung pendahulunya (Ismail Saleh) tentang 6 tertib dalam

pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan (yaitu : Tertib Adminis-trasi; Tertib Anggaran; Tertib Peralatan; Tertib Perkantoran; Tertib Disiplin Kerja; dan Tertib Kepegawaian), Hendarman **menambahkan tertib ke-7** pada Hari Adyaksa 2008, yaitu "TERTIB MORAL" yang menjiwai enam tertib yang telah ada.

Langkah-langkah kebijakan berbasis moral/hati nurani yang diambilnya itu, tidak terlepas dari hasil didikan yang terbina sejak kecil dalam lingkungan keluarga. Sewaktu ditanya oleh wartawan Barito Post setelah peresmian Kantin Kejujuran ke-7000 di SMPN 2 Banjarbaru, 29 April 2009, Hendarman menyatakan : "Saya tidak berani tidak jujur, karena kalau tidak jujur, saya takut dicambuk orang tua saya" (<http://www.kalselprov.go.id/>).

Sangat disadari nampaknya oleh Dimas Hendarman, berdasarkan pengalamannya, bahwa sampai berakhirnya tugas yang diembannya selaku JAGUNG sulit rasanya korupsi diberantas hanya semata-mata dengan tindakan sesaat melalui jalur penegakan hukum (pidana). Oleh karena itu, Dimas Hendarman lebih melihat ke masa depan, dengan mengembangkan kebijakan integral/komprehensif dalam penanggulangan korupsi.

Dari berbagai pernyataan dan kebijakan yang diambilnya, dapatlah ditarik benang merah dari kebijakan strategisnya, yaitu : "MEMBANGUN MASA DEPAN BEBAS

KORUPSI MELALUI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BUDAYA ANTI KORUPSI". Jadi ingin mengembangkan "pendekatan kultural/moral", di samping "pendekatan substantif/normatif" dan "pendekatan struktural" (melalui reformasi birokrasi).

Pendekatan kultural/moral melalui pembinaan budaya jujur yang ditempuhnya terkesan juga berlandaskan nilai-nilai kebangsaan yang religius. Hal ini nampaknya dilatar belakangi oleh keresahannya terhadap budaya nasional yang semakin luntur.

Kebijakan penegakan hukum (dalam rangka memberantas korupsi) melalui strategi kejujuran berlandaskan nilai-nilai religius ini, sangat bersesuaian dengan keyakinan para begawan ilmu hukum, a.l. Prof. Moeljatno dan Prof. Van Hamel (di bidang hukum pidana) dan Prof. Dr. Notohamidjojo (di bidang Filsafat Hukum). **Prof. Moeljatno** pernah menyatakan, bahwa :

"Dalam negara kita yang berdasarkan Pancasila, dengan adanya sila ketuhanannya, maka tiap ilmu pengetahuan (termasuk ilmu hukum, pen.) yang tidak dibarengi dengan ilmu ketuhanan adalah tidak lengkap".

Dengan demikian, seharusnya tidak ada "sekulerisasi" dalam bidang hukum, baik dalam pembuatannya (bidang legislasi), penegakannya (bidang aplikasi/judisial/*law enforcement*), maupun bidang pendidikan ilmu hukum (bidang

edukasi) di Indonesia. Ilmu hukum juga seyogyanya belajar dari ilmu Tuhan dalam “mengatur/menata” kehidupan, sebagaimana halnya yang telah dilakukan para ahli ilmu eksak (astronom; fisikawan; ahli matematika; ahli aero-dinamica; ahli bio-kimia; ahli bio-molekuler; biologiwon dsb.) yang mengkaji ilmu Tuhan dalam menciptakan alam untuk memecahkan berbagai masalah kehidupan. Ilmu ini dikenal dengan nama “Biomimetika” (*biomi-metics*), yang sering disingkat pengertiannya sebagai “teknologi meniru alam” (*tecnology imitates nature; human-made processes, substances, devices, or systems that imitate nature*). Kalau ilmuwan eksak belajar dari “*das Sein*” (realita/nature/alam raya) ciptaan Tuhan, karena memang tergolong “*naturwissenschaft*”, bukankah wajar ilmu hukum yang termasuk “*Geisteswissenschaft*” seharusnya juga mengkaji/mengambil pelajaran nilai-nilai kejiwaan/spiritual (*das Sollen*) yang terkandung dalam tuntunan Tuhan, antara lain dari nilai “kejujuran”? Dilihat dari sudut ini, gagasan Dimas Hendarman yang ber-orientasi pada “nilai/spirit kebangsaan yang religius”, tentunya mempunyai “nilai lebih” tersendiri.

Di dalam negara Pancasila yang berketuhanan, memang seharusnya tidak boleh terjadi sekularisasi dalam semua bidang kehidupan. Di bidang hukum terlebih lagi, karena hakikat hukum ingin “mengatur/menata”. Bukankah Tuhan yang “Maha mengatur dan menata” dan “Maha Mengetahui sedetail-

detailnya” (yang nampak maupun tidak; kondisi saat ini maupun yad. dan akibat-akibatnya untuk yad.). Kalau Tuhan menyuruh orang berlaku jujur, tidak dusta; menegakkan kebenaran dan keadilan; menyuruh berbuat baik dan beramal, berpuasa, shalat dsb.; serta menyebutkan berbagai larangan (tidak berbuat curang; jangan menipu, jangan berzina, mencuri/korupsi; dsb); tentunya Tuhan tidak bodoh. Tuhan sangat tahu akan akibat-akibatnya. Saat ini kita sudah merasakan akibatnya; akibat dari tidak adanya kejujuran/transparansi dan akibat tidak ditegakkannya keadilan menurut tuntunan Tuhan, padahal UU menyebutkan peradilan (penegakan hukum) dilakukan “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan YME”. Namun dalam prak-teknya “ditegakkan dengan amplop, kebencian dan sentimen, kegeraman/kemarahan golongan; dengan penuh KKN dsb”). Semua ini menunjukkan gejala sekulerisasi yang semakin parah. Ini pulalah nampaknya yang diresahkan oleh Dimas Hendarman dalam bidang penegakan hukum yang menjadi tugasnya.

Dilihat dari sudut ini, ide KK bukan “langkah kecil”. Saya pernah baca di internet, tulisan di Koran Tempo 19 Oktober 2008, yang walaupun menyatakan gagasan ini tetap bagus, tapi dikatakan merupakan “langkah yang sangat kecil untuk menyelamatkan bangsa dari virus korupsi”. Menurut

saya, ini bukan langkah “sangat kecil”, tapi justru “sangat besar”, “sangat berat”, dan “sangat mulia”.

Diungkapkan dalam tulisan itu tentang cerita warung kejujuran di lereng Gunung Batukaru, Bali, tempat pemukiman para petani kopi yang hidupnya begitu sederhana: miskin tidak, kaya juga belum. Mereka punya warung yang tidak pernah dijaga, tapi pembelinya tidak ada yang tidak bayar, dan warung tidak pernah rugi, karena disana ada budaya “*kalau beli tidak bayar atau menggasak uang di warung, sama saja dengan kuluk (anjing)*” dan “*takut akan hukum karma*” (*takut dapat celaka*). Gambaran budaya kejujuran komunitas Gn. Batukaru itu, tentunya juga ada di tempat lain.

Kalau budaya jujur yang ada di masyarakat itu semakin menipis dan bahkan lenyap sama sekali setelah “orang gunung” itu menjadi “orang kota”, atau setelah “petani kopi” itu menjadi “petani kota” (jadi pegawai/pejabat/penyelenggara negara), maka upaya membangun kembali budaya jujur yang telah semakin memudar itu, bukankah merupa-kan “langkah sangat besar dan sangat berat”? Terlebih saat ini, budaya tidak jujur terjadi di mana-mana, di seluruh bidang kehidupan bermasyarakat (a.l. bidang politik, ekonomi dan pembangunan, pendidikan, medis dan produk obat-obatan/makanan/elektronik; perpajakan; asuransi; HAKI; sex dsb). Bahkan di dunia maya pun terjadi (penipuan lewat sms/email palsu; ada istilah *credit card fraud; cyber fraud; internet banking fraud;*

on-line fraud; ; cyber-sex; cyber cohabitation; dengan berbagai metoda penipuan/licik seperti *cybersquatters, cyberparasite, typosquatter dsb*).

Hadirin sekalian;

Pendekatan integral/komprehensif yang dilakukan Dimas Hendarman, memang bukan hal baru dilihat dari sudut pandang konseptual teoritis dan perkembangan kebijakan global yang sering terungkap dalam dokumen-dokumen internasional. Namun, di tangan Hendarman, kebijakan integral itu bukan sebatas pandangan konseptual teoritik, tetapi benar-benar telah diwujudkan dalam kebijakan operasional yang konkret/ senyatanya. Walaupun tentunya, di masa mendatang masih memerlukan evaluasi dan penyempurnaan, dan diintegrasikan dalam kebijakan nasional yang integral dalam menanggulangi masalah-masalah sosial lainnya.

Akhirnya patut dikemukakan, bahwa dengan ide dan realita membentuk SAK Pangeran Diponegoro, berarti dimas Hendarman di samping mengharumkan nama pahlawan dan almamaternya, ia juga melakukan pendekatan nilai-nilai historik-patriotik dalam upaya membangun budaya anti-korupsi, khususnya "budaya jujur".

Dalam teladan keagamaan, "kejujuran/kebenaran" merupakan gelar yang teramat mulia karena kejujuran, berkaitan erat dengan nilai "kebenaran; keadilan; keikhlasan;

amanah; dapat dipercaya; taqwa dsb”. Nabi Muhammad misalnya mendapat gelar ”Al-Aamin” (yang dipercaya) dan sahabat Abu Bakar mendapat gelar ”Ash-shidiq” (yang benar, jujur/dapat dipercaya).

Selaku Tim Promotor, saya pribadi dengan dukungan doa para hadirin, berharap Dimas Hendarman tidak sekedar menyandang gelar Dr. HC, tetapi juga mendapat gelar kehormatan tertinggi sebagai ”SH/JAKSA/DR. H.C. AL-AMIN”, karena ”al-amin” (yang dipercaya/yang jujur dan pemangku amanah) merupakan derajat/martabat kemanusiaan tertinggi yang lebih mengandung nilai substantif/susila. Tentunya diharapkan, tidak hanya jujur dalam berperilaku hukum tetapi juga jujur dalam hati, jujur dalam pemikiran, dan jujur dalam pengabdian (kepada bangsa, negara, dan perhambaan kepada Tuhan). Gelar kejujuran ini tentunya menjadi beban berat. Semoga Allah selalu memberi kekuatan dan bimbingan agar Dimas tetap istiqomah.

Wassalamu’alaikum wr. wb;

Semarang, 18 Juli 2009,
Kampus Undip Tembalang

Tim Promotor :
Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH
Prof. Dr. Nyoman Serikat Putrajaya, SH, MH.